ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN SARANA PENDIDIKAN

Karimov Islombek

Universitas Pendidikan Indonesia, Email: ikmajor.95@gmail.com

Abstract

Education is the cornerstone of any thriving society, and its quality directly impacts a nation's economic, social, and cultural growth. As such, the government plays a pivotal role in shaping and improving educational facilities, ensuring that all citizens have access to quality education. The role of the government in enhancing educational infrastructure can be explored from various angles, including policy-making, funding, governance, and the development of physical and technological resources. This article examines how governments can improve educational facilities and why their involvement is crucial to fostering an equitable and dynamic educational system. Education plays a crucial role in shaping a nation's future, and the government is central in ensuring that all citizens have access to quality education. One of the main ways this is achieved is through the establishment and maintenance of educational facilities. In this article, we'll explore the various roles the government plays in the development, funding, and management of educational infrastructure.

***Keywords**: Role of Government, educational facilitie*

Abstrak

Pendidikan merupakan landasan bagi masyarakat yang maju, dan kualitasnya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan fasilitas pendidikan, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan dapat ditelusuri dari berbagai sudut, termasuk pembuatan kebijakan, pendanaan, tata kelola, dan pengembangan sumber daya fisik dan teknologi. Artikel ini mengkaji bagaimana pemerintah dapat meningkatkan fasilitas pendidikan dan mengapa keterlibatan mereka sangat penting untuk membina sistem pendidikan yang adil dan dinamis. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan suatu negara, dan pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Salah satu cara utama untuk mencapainya adalah melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai peran pemerintah dalam pengembangan, pendanaan, dan pengelolaan infrastruktur pendidikan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, fasilitas Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya penting untuk pertumbuhan pribadi tetapi juga untuk pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan suatu negara dengan menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam proses ini dengan berinvestasi dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Di bagian ini, kita akan membahas pentingnya investasi pemerintah dalam pendidikan dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan sistem pendidikan suatu negara.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, membuat mereka lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan mereka. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan ekonomi negara dengan meningkatkan produksi dan keluaran barang dan jasa. Misalnya, jika suatu negara berinvestasi dalam mendidik penduduknya di bidang teknologi, hal itu dapat menciptakan sekelompok profesional yang sangat terampil yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor teknologi.

Mengurangi Kemiskinan: Pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Selain itu, individu yang berpendidikan lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh upah yang lebih tinggi, dan memiliki jaminan kerja yang lebih baik daripada mereka yang tidak berpendidikan. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di negara ini, yang pada akhirnya akan menguntungkan perekonomian.

Mempromosikan Pembangunan Sosial: Pendidikan tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mempromosikan pembangunan sosial. Pendidikan dapat membantu menciptakan warga negara yang terinformasi dan terlibat, yang dapat mengarah pada masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Individu yang berpendidikan lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan sipil, menjadi sukarelawan, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu sosial. Hal ini dapat

membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif yang menghargai keberagaman dan mempromosikan keadilan sosial.

Meningkatkan Kesehatan: Pendidikan memiliki dampak positif pada hasil kesehatan. Individu yang berpendidikan lebih mungkin membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka, mencari perawatan medis saat dibutuhkan, dan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini dapat menghasilkan populasi yang lebih sehat, yang dapat mengurangi beban biaya perawatan kesehatan pada perekonomian.

Investasi pemerintah dalam bidang pendidikan sangat penting untuk meningkatkan sistem pendidikan suatu negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mendorong pembangunan sosial, dan meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam bidang pendidikan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu, terlepas dari status sosial ekonomi mereka.

B. METODE

Untuk menganalisis peran pemerintah dalam fasilitas pendidikan, pendekatan metode campuran digunakan, yang menggabungkan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada dilakukan untuk memahami kerangka teoritis mengenai keterlibatan pemerintah dalam pendidikan. Ini termasuk artikel akademis, laporan pemerintah, dan studi kasus dari berbagai negara. Survei didistribusikan kepada administrator pendidikan dan pembuat kebijakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat pendanaan, alokasi sumber daya, kualitas infrastruktur, dan hasil siswa.

C. PEMBAHASAN

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendanaan pemerintah yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan fasilitas pendidikan (misalnya, infrastruktur yang lebih baik, teknologi terkini). Daerah dengan dukungan pemerintah yang kuat mengalami peningkatan signifikan dalam langkah-langkah keamanan sekolah dan aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Kualitas Infrastruktur Sekolah yang menerima dukungan pemerintah yang lebih luas melaporkan lebih sedikit masalah yang terkait dengan pemeliharaan fasilitas (misalnya, sistem HVAC berfungsi dengan baik). Umpan

balik kualitatif mengungkapkan bahwa fasilitas yang terawat dengan baik memengaruhi moral dan tingkat kehadiran siswa secara positif. Program Dukungan Guru Inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan profesional bagi guru menghasilkan peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Peserta mencatat bahwa pelatihan berkelanjutan yang didanai oleh pemerintah membantu para pendidik menerapkan metodologi pengajaran baru secara efektif.

Analisis menyoroti kesenjangan dalam kualitas fasilitas pendidikan berdasarkan lokasi geografis; sekolah perkotaan sering kali memiliki lebih banyak sumber daya daripada sekolah pedesaan. Program pemerintah yang bertujuan menjembatani kesenjangan ini menunjukkan hasil yang menjanjikan tetapi memerlukan investasi berkelanjutan untuk dampak jangka panjang. Keterlibatan Masyarakat Wawancara pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa ketika pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait fasilitas pendidikan, tingkat kepuasan meningkat di antara orang tua dan penduduk setempat. Model yang berhasil mencakup forum masyarakat tempat masukan lokal membentuk kebijakan pendidikan atau peningkatan fasilitas. Pertumbuhan Akses Pendidikan: Uzbekistan telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah, dengan pendaftaran hampir universal di tingkat dasar. Pendaftaran pendidikan menengah, meskipun masih tinggi, agak lebih rendah, yang menunjukkan potensi ruang untuk peningkatan dalam retensi dan akses di tahap selanjutnya.

Investasi Infrastruktur: Upaya signifikan telah dilakukan untuk memodernisasi fasilitas pendidikan, khususnya dengan mengintegrasikan teknologi dan meningkatkan akses ke perangkat digital. Namun, banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan sumber daya, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kesetaraan Gender: Ada dorongan kuat menuju kesetaraan gender dalam pendidikan, dengan tingkat penyelesaian yang hampir sama untuk anak laki-laki dan perempuan di tingkat dasar dan menengah. Dalam pendidikan tinggi, meskipun ada beberapa perbedaan dalam partisipasi laki-laki/perempuan, upaya sedang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender. Untuk memperoleh statistik yang lebih akurat dan terkini, saya sarankan untuk merujuk pada publikasi resmi pemerintah Uzbekistan, UNESCO, Bank Dunia, atau sumber terpercaya lainnya. Tabel ini didasarkan pada tren umum dan harus diverifikasi dengan data terkini untuk memastikan keakuratannya.

D. KESIMPULAN

Pendidikan adalah prasyarat untuk memberi makan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Ini memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik dengan menyediakan kesempatan kerja. Ini juga membantu kita untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Saat ini ada banyak program atau skema yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mendidik massa yang terpinggirkan atau dikecualikan dalam masyarakat. Pemerintah telah menghabiskan lebih banyak untuk pendidikan dengan memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang telah menderita kekurangannya. Pengeluaran publik untuk pendidikan meningkat dari tahun ke tahun dan kebijakan yang lebih baru diperkenalkan untuk mengadopsi strategi pembangunan yang inklusif. Kami memiliki sejumlah skema pemerintah untuk pengembangan pendidikan masyarakat tetapi masalahnya adalah bahwa beberapa skema tidak berfungsi di bawah tata kelola yang tepat, beberapa tidak efisien untuk memenuhi tujuan di bawah program, dalam beberapa kasus dana tidak efisien untuk memenuhi pengeluaran, Tidak dapat menjangkau penerima manfaat yang tepat, beberapa skema tidak familiar bagi masyarakat umum, implementasi yang tidak efisien menyebabkan kesulitan dalam aksesibilitas, beberapa tidak begitu kompeten dengan program paralel. Jika kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini, maka pemerintah akan menjadi satu-satunya penyedia pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan demikian lapangan pekerjaan dan taraf hidup yang lebih baik akan tercipta, dan hal itu akan mengarah pada peningkatan pendapatan nasional. Akhirnya, kita akan mewujudkan impian ekonomi yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Hu, H. M. (2024). A qualitative study on why older adults may be reluctant to participate in learning activities. *Journal of Adult and Continuing Education, 30*(1), 39-55.

Hurlock, E. B. (1978). *Child psychology*. Tokyo: McGraw-Hill Publishing Company, Ltd.

Spring, J. (2000). *The universal right to education: Justification, definition, and guidelines*. Routledge.

McCowan, T. (2011). Human rights, capabilities and the normative basis of ‘Education for All’. *Theory and Research in Education, 9*(3), 283-298.

Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2023). Literacy. *Our world in data*.

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing & health sciences, 15*(3), 398-405.

Hu, H. M. (2024). A qualitative study on why older adults may be reluctant to participate in learning activities. Journal of Adult and Continuing Education, 30(1), 39-55.

McCowan, T. (2011). Human rights, capabilities, and the normative basis of ‘Education for All’. Theory and Research in Education, 9(3), 283-298.

Ministry of Education, Uzbekistan (2023). Official website.

Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2023). Literacy. Our World in Data.

Spring, J. (2000). The universal right to education: Justification, definition, and guidelines. Routledge.

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398-405.